



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2002. *Fungsi Manajemen Sumber penerimaan daerah*. Pemeriksa No. 87, Oktober 2002.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Bailey, Stephen J. 1999. *Local Government Economics*. London: McMillan.
- Brata, A.G. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- BPS. 2008. *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2002. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja Pad, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Halim, Abdul (ed). 2004. *Manajemen Sumber Penerimaan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kunarjo. 1992. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurgiyantoro, B., Gunawan, Marzuki. 2004. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Sumber Penerimaan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wignosubroto, Sutandyo dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.



Dinamika sumber penerimaan daerah dan hubungannya dengan tingkat perkembangan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 1994-2005

Fikri Muslim, Dr. Lutfi Muta'ali, M.T.; Drs. Joko Christanto, M.Sc.  
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.